



Judul : Perlindungan Data - Satuan Tugas Diminta Tak Salah Arah
Tanggal : Senin, 19 September 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

PERLINDUNGAN DATA

Satuan Tugas Diminta Tak Salah Arah

JAKARTA, KOMPAS — Satuan Tugas Perlindungan Data yang dibentuk oleh pemerintah kembali diingatkan agar tidak salah arah. Selain mengejar siapa orang di balik akun peretas Bjorka, satuan tugas harus bisa memperkuat sistem keamanan siber di instansi-instansi pengelola data sehingga kebocoran data tidak terus berulang.

"Sebelum Bjorka telah terjadi banyak kebocoran data di Indonesia. Sudah lebih dari dua tahun diawali dengan kebocoran data di BPJS. Setelah kebocoran di BPJS dan kebocoran data lainnya, pemerintah sama sekali tidak ada tindakan yang serius. Yang ada, malah saling melindungi," ujar pemerhati keamanan siber dan digital forensik dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, Minggu (18/9/2022).

Sejak akhir Agustus, Bjorka memasarkan sejumlah data pribadi yang diklaim dibocorkan dari proses registrasi kartu SIM dari semua operator telekomunikasi dan dari situs Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, ia memasarkan data surat menyurat presiden dan data pribadi sejumlah pejabat negara.

Sebelum aksi Bjorka, kebocoran data berulang terjadi. Pada 2019, berdasarkan hasil investigasi *Kompas*, misalnya, diperoleh lebih dari 100.000 data pribadi yang beredar di kalangan tenaga pemasaran. Selain itu, pernah pula terjadi kebocoran data peserta BPJS Kesehatan dan data pengguna Indihome.

Alfons melihat, pemerintah baru mengambil tindakan setelah aksi Bjorka. Padahal, publik sudah bertahun-tahun menjadi

korban kebocoran data. Akar permasalahannya, menurut dia, instansi pemerintah tak mengelola data dengan baik.

Karena itu, Satgas Perlindungan Data seharusnya bisa memaksa instansi yang tak mengelola data dengan baik untuk memperkuat sistemnya. Selain itu, penting juga agar pemerintah melakukan audit dan tindakan pengamanan data secara menyeluruh. "Jadi, satgas ini saya harapkan jangan salah arah," kata Alfons.

Pengesahan RUU PDP

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akan segera disahkan. Untuk itu, pada Senin (19/9), pimpinan DPR akan menggelar rapat pimpinan dan Badan Musyawarah DPR untuk membahas agenda pengesahan RUU PDP dalam rapat paripurna DPR.

Ia membenarkan, DPR menargetkan agar paripurna pengesahan RUU PDP dilaksanakan pada Selasa (20/9). "Iya, kemungkinan Selasa," katanya.

Menurut anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, UU PDP dapat menjadi payung hukum untuk memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat. Selama ini, ada kekosongan hukum sehingga negara tidak memiliki mekanisme paksa kepada penyelenggara sistem elektronik untuk menerapkan standar keamanan siber. (PDS/NIA)